

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 149 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Asesor Kompetensi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Asesmen Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan tanggung jawab dan tugas Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat Asesor Kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Asesor Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Asesor Kompetensi memiliki tanggung jawab dan tugas sebagai berikut:
1. Tanggung Jawab:
    - a. melaksanakan tugas yang diberikan Direktur Sertifikasi Profesi sesuai dengan instruksi kerja Asesor Kompetensi;
    - b. menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas;
    - c. menjaga sarana Uji Kompetensi; dan
    - d. menjaga kerahasiaan Materi Uji Kompetensi (MUK), data Peserta Sertifikasi, dan informasi lain yang perlu dirahasiakan.
  2. Tugas:

Menilai kompetensi Peserta Sertifikasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tanggung jawab dan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Asesor Kompetensi memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Sistem



Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KELIMA** : Kepada Asesor Kompetensi yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini diberikan honorarium, akomodasi, transportasi lokal dan tiket *at cost* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 129 Tahun 2018 tentang Penetapan Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Juni 2022

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG ASESOR KOMPETENSI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 149 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JUNI 2022

**DAFTAR NAMA ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Instansi</b>
1	Ade Rizky Emirsyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3	Anatasia	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4	Andy Martanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5	Andy Purwa Sejati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6	Angga Widita Amirul	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7	Anita Carollin	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8	Ari Sulindra	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9	Arif Budiman Anwar	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10	Arif Rachman	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Nama	Instansi
11	Deasy Rachmawati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12	Dian Rahmayanti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14	Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15	Edi Kristiyanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16	Ermawati Septianingtyas	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17	Eva Nurdinna Agustini	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18	Fadli Arif	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19	Fajar Adi Hemawan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20	Firmansyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21	Hardi Afriansyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23	Heldi Yudiyatna	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24	Hermawan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25	Hestri Rokayah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26	Iwan Herniwan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



No	Nama	Instansi
27	Jhon Piter Halomoan Situmorang	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28	Muhammad Aris Supriyanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29	Manshur Riadli	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30	Martdetiara Dewi Kartika	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
31	Miftah Irfaniah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
33	Muhammad Firdaus	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34	Nungky Karina Putri	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
35	Octo Army	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36	Ranto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
37	Rinaldi Morintosh	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
38	Rovazio Okiiza	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
39	Selamet Budiharto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
40	Siti Ulyanah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
41	Suharti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
42	Sulmiari	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No	Nama	Instansi
43	Sutan Suangkupon Lubis	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
44	Tri Susanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
45	Umi Nurnaeni	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
46	Vina Da'watul Aropah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
47	Wildan Massani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
48	Windy Dian Trisari	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49	Zulhenny	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
50	Aldy Turman	Individu
51	Anastasia Citra Puspita	Ombudsman Republik Indonesia
52	Ati Kuswati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
53	Blessmiyanda	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
54	Budi Ristianto	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
55	Budi Sukiswo	Pemerintah Kabupaten Sleman
56	Cecep Fauzy Chaidir	Individu
57	Dade Nursahid Ahmad Yasin	Individu
58	Davli	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
59	Dharma Nursani	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
60	Edi Tamtomo	Badan Pemeriksa Keuangan
61	Eko Hariyanto	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
62	Eko Suryo Putranto	Pemerintah Kabupaten Cirebon



No	Nama	Instansi
63	Ferry Yanto	Pemerintah Kota Pekanbaru
64	Hendra Hadi	Kementerian Agama
65	Hernik Jatmiati	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
66	Hidayah Amirullah	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
67	I Gde Uma Darmapramita	Pemerintah Kabupaten Badung
68	Irawaty Imran	Individu
69	Isriadi Putranto	Pemerintah Kabupaten Karanganyar
70	Lili Hojali	Pemerintah Provinsi Banten
71	Lusningsih	Pemerintah Kota Yogyakarta
72	Meilia Witri Budi Utami	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
73	Mita Astari Yatnanti	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta
74	Moh. Naim	Kementerian Agama
75	Muhammad Suwardi	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
76	Muhammad Winarno	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
77	Nunu Nurdiana	Politeknik Negeri Padang
78	Nur Basuki	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
79	Posma Marbun	Individu
80	Rahmad	Pemerintah Kota Yogyakarta
81	Rakhma Kusuma Wardhani	Pemerintah Kota Yogyakarta
82	Reflus	Individu
83	Reifeldi	Individu
84	Rita Berlis	Individu
85	Sagung Intan Widyarie	Pemerintah Kabupaten Badung
86	Suherman	Pemerintah Provinsi Banten
87	Sulhanudin	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Nama	Instansi
88	Tri Wahyu Widodo	Badan Riset dan Inovasi Nasional
89	Wiwin Wulan Kuswinarti	Pemerintah Kota Yogyakarta
90	Yasip Khasani	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG ASESOR KOMPETENSI  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 149 TAHUN 2022

TANGGAL : 13 JUNI 2022

**KOMPONEN BIAYA PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No	Komponen	Volume Pekerjaan	Honorarium (Rp)	Keterangan
1	Uji Kompetensi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola PBJ melalui Perpindahan dari Jabatan Lain	1 Paket Uji Kompetensi	2.500.000	1 (satu) Paket Uji Kompetensi untuk 5 (lima) Peserta Sertifikasi
2	Uji Kompetensi Penjurangan bagi Pengelola PBJ	1 Paket Uji Kompetensi	1.800.000	1 (satu) Paket Uji Kompetensi untuk 1 (satu) Peserta Sertifikasi
3	Uji Kompetensi bagi Personel Lainnya (Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan)	1 Paket Uji Kompetensi	2.500.000	1 (satu) Paket Uji Kompetensi untuk 2 (dua) Peserta Sertifikasi



No	Komponen	Volume Pekerjaan	Honorarium (Rp)	Keterangan
4	Transportasi: 1. Dari Jakarta ke lokasi 2. Transportasi lokal 3. Tiket <i>at cost</i>			Disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan atau Standar Keuangan Daerah yang berlaku
5	Akomodasi			Disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan atau Standar Keuangan Daerah yang berlaku

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS